

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA

The Effect of Provincial Minimum Wage On Investment In Indonesia

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: robby.sirait@dpr.go.id

Abstract

This research empirically to analyze the effect of provincial minimum wage on investment in Indonesia. The data were collected from 32 provinces between 2011 and 2019. To analyze cross-provinces panel data, we used fixed effect model (FEM). The findings showed a negative relationship between provincial minimum wage and investment, and statistically significant. Another finding is human capital as measured by the level of education, health and purchasing power of the population have a positive influence on investment and statistically significant. And finally, we provide a few recommendations which policy makers may adopt in reducing the impact of provincial minimum wage increases on investment.

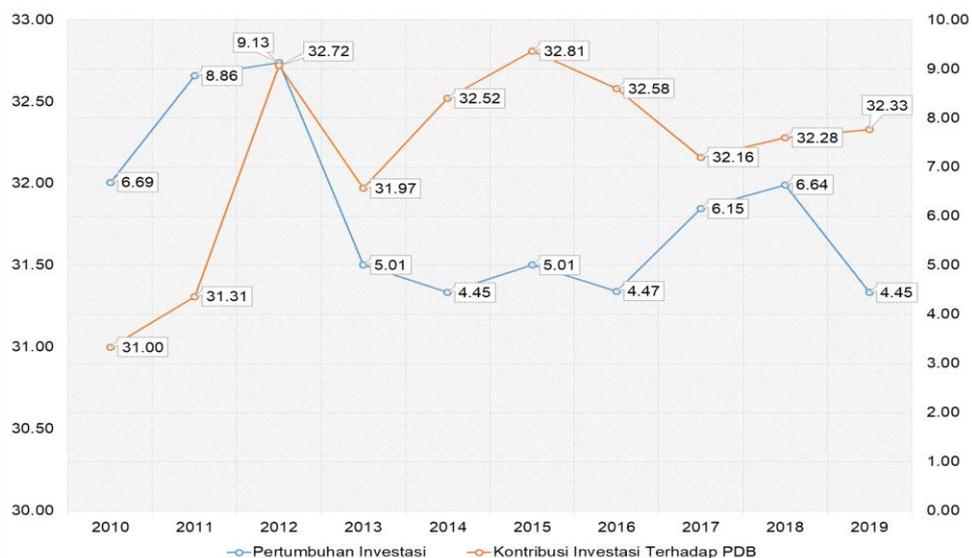
Keywords: Provincial Minimum Wage, Human Capital, Investment, Fixed Effect

1. Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012). Harrod-Domar, dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi (Murni, 2016 dalam Kambono, 2020). Dengan demikian, investasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi akan menambah stok barang modal yang tersedia atau *capital stock* pada perekonomian sebuah negara. Penambahan ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara nasional, yang akhirnya akan mendorong peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Selain itu, kinerja investasi dalam satu dekade terakhir mengalami tren yang berfluktuasi, baik dari sisi kontribusi terhadap PDB maupun pertumbuhan tahunan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kinerja investasi dalam lima tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti (Gambar 1).

Gambar 1. Kontribusi Investasi Terhadap PDB dan Pertumbuhan Investasi (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah.

Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Teori Dunning, faktor makroekonomi yang memengaruhi investasi (dalam hal ini *Foreign Direct Investment/FDI*) adalah ukuran pasar, stabilitas makroekonomi, kelayakan kredit atau pinjaman, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, dan biaya tenaga kerja di negara tujuan investasi (Dua dan Garg, 2015). Dari teori tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja, yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja.

Hasil studi empiris hubungan antara biaya tenaga kerja atau upah terhadap investasi beragam dan ambigu. Penelitian Schneider and Frey (1985) dan Vijayakumar, Sridharan dan Rao (2010) dalam Dua & Garg (2015)

menemukan bahwa upah/gaji berpengaruh positif terhadap investasi (dalam hal ini FDI). Hubungan positif ini dimungkinkan terjadi apabila kenaikan upah atau pemberian upah yang tinggi kepada pekerja yang berkompeten atau memiliki keterampilan akan meningkatkan produktivitas pekerja yang akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mendorong peningkatan investasi.

Hatziu (2000), dan Janicki dan Wunnava (2004) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan arus modal keluar (FDI *outflow*) dan menurunkan masuknya investasi (FDI). Artinya, biaya tenaga kerja atau upah memiliki hubungan negatif dengan FDI. Penelitian Lai dan Sarkar (2011) juga menemukan hal yang senada dimana upah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI di India. Demikian juga penelitian Kurniati et.al (2007) yang menemukan bahwa peningkatan upah buruh sebesar 1 persen di negara-negara Asia yang menjadi sampel, akan menurunkan investasi yang masuk ke negara-negara tersebut sebesar 0,30 persen.

Untuk Indonesia, penelitian Sodik dan Nuryadin (2008) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia pada periode 1993-2003. Untuk variabel investasi, penelitian ini menggunakan nilai total absolut dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau FDI dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau *Domestic Direct Investment* (DDI). Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Anggrainy (2013), dimana Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang memiliki dampak negatif terhadap investasi di Kota Malang periode 2001-2011. Hubungan negatif upah terhadap investasi atau PMA/FDI di Indonesia juga ditemukan pada penelitian Utma dan Rakhman (2019), namun tidak signifikan secara statistik pada periode 2013-2016.

Berbeda dengan hasil penelitian Sodik dan Nuryadin (2008), Utma dan Rakhman (2019), dan Anggrainy (2013), penelitian Sitorus (2017) menemukan hubungan yang searah dimana upah berpengaruh positif terhadap FDI di Pulau Jawa pada 2001-2016. Peneliti berargumentasi bahwa hubungan positif tersebut dapat terjadi apabila upah yang tinggi pada pekerja yang kompeten dan berketerampilan akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi. Argumentasi tersebut didasarkan pada teori *efficiency wage* yang menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Demikian sebaliknya. Teori *efficiency wage* yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif (Sitorus, 2017). Hubungan positif antara upah dengan investasi juga ditemukan dalam penelitian Sanusi et.al (2019). Penelitian ini menemukan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Pulau Jawa pada periode 2010-2018. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Sitorus (2017), hubungan positif ini dikaitkan dengan upah tinggi akan meningkatkan produktivitas pekerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan bagi investor. Biaya upah yang tinggi tanpa diikuti dengan produktivitas tenaga kerja

yang tinggi dapat menjadi masalah bagi perusahaan, karena dapat memengaruhi keuntungan yang didapatkan (Sanusi et.al, 2019).

Dari berbagai penelitian yang meneliti determinan investasi, baik di maupun luar Indonesia, para peneliti lebih sering menggunakan penanaman modal asing atau FDI sebagai variabel terikat atau variabel proksi dari investasi. Padahal, investasi dalam konteks aktivitas perekonomian sebuah negara dalam kurun waktu tertentu bukan hanya yang bersumber dari luar atau asing saja. Namun, investasi dimaksud juga bersumber dari dalam negeri atau *domestic direct investment*. Meskipun demikian, penggunaan PMA/FDI ditambah PMDN/DDI sebagai proksi investasi agregat dari suatu perekonomian negara juga dirasa belum tepat. Hal ini didasarkan pada pernyataan BPS (2018) bahwa investasi dalam bentuk barang modal dikenal dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kemudian, PMA/FDI dan PMDN/DDI hanya merupakan sebagian dari total investasi yang dicatatkan sebagai PMTB dalam perhitungan PDB nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh upah atau biaya tenaga kerja terhadap investasi, dengan menggunakan PMTB sebagai ukuran investasi di Indonesia. Dari beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa upah atau biaya tenaga kerja memiliki pengaruh yang beragam dan ambigu terhadap investasi (khususnya FDI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap investasi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Upah dan Investasi

Dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU tentang Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan upah minimum adalah standar minimum upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang ditujukan untuk pemenuhan kehidupan layak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi variabel dan upah merupakan imbal jasa dari penawaran tenaga kerja yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Upah tersebut merupakan salah satu komponen biaya faktor produksi yang sifatnya variabel dan memengaruhi tingkat produksi atau produktivitas. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya (Rahardja dan Manurung, 2010). Dengan demikian, upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

keputusan pelaku usaha atau produsen dalam meningkatkan produksinya. Penambahan atau peningkatan produksi tersebut sangat bergantung pada jumlah stok barang modal yang tersedia (*capital stock*). Untuk meningkatkan produksi, maka salah satu yang dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah *capital stock*. Penambahan inilah yang disebut investasi. Rahardja dan Manurung (2014) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa peningkatan jumlah produksi dipengaruhi oleh upah sebagai biaya faktor produksi dan peningkatan jumlah produksi mensyaratkan penambahan stok barang modal yang tersedia atau investasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan salah satu determinan yang diperhitungkan oleh pelaku usaha dalam pengambilan keputusan penambahan stok modal atau investasi.

Dalam teori makroekonomi, disebutkan bahwa kenaikan tingkat upah akan berimplikasi pada kenaikan tingkat pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan permintaan uang. Menurut Keynes, kenaikan permintaan uang tersebut akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga, dengan asumsi *ceteris paribus* (Anggrainy, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dengan asumsi suplai uang tetap stabil (Stonier dan Haque, 1975 dalam Anggrainy, 2013). Selanjutnya tingkat bunga yang tinggi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap investasi, yaitu menyebabkan turunnya investasi (Anggrainy, 2013). Hal ini sejalan dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa penurunan tingkat bunga akan meningkatkan permintaan terhadap investasi dan demikian sebaliknya. Artinya, kenaikan tingkat suku bunga akibat kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, yang akhirnya akan memengaruhi investasi.

2.2. Studi Empiris Tentang Pengaruh Upah Terhadap Investasi

Berdasarkan Teori Dunning, faktor makroekonomi yang memengaruhi investasi (dalam hal ini FDI) adalah ukuran pasar, stabilitas makroekonomi, kelayakan kredit atau pinjaman, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, dan biaya tenaga kerja di negara tujuan investasi (Dua dan Garg, 2015). Dari teori tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja. Berdasarkan beberapa hasil studi empiris, ditemukan bahwa hubungan antara biaya tenaga kerja atau upah terhadap investasi beragam dan ambigu.

Dalam literatur ilmu ekonomi, upah merupakan salah satu komponen yang memengaruhi besaran biaya produksi maupun biaya investasi. Kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi maupun investasi, baik secara langsung maupun ditransmisi melalui kenaikan suku bunga akibat kenaikan upah yang berimplikasi pada kenaikan permintaan uang pada kondisi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja investasi suatu negara. Upah buruh yang meningkat menunjukkan

adanya penambahan biaya produksi, sehingga biaya untuk melakukan produksi di dalam suatu negara relatif menjadi lebih mahal (Kurniati et.al, 2007). Hal ini yang memengaruhi keputusan investasi. Bagi beberapa pengusaha, upah minimum merupakan biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan. Bila kenaikan biaya produksi tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas pekerja maka keuntungan perusahaan akan berkurang dan tingkat investasi juga akan berkurang (Utma dan Rakhman, 2019).

Penelitian Hatziu (2000), dan Janicki dan Wunnava (2004) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan arus modal keluar (FDI *outflow*) dan menurunkan masuknya investasi (FDI). Artinya, biaya tenaga kerja atau upah memiliki hubungan negatif dengan FDI. Temuan tersebut senada dengan hasil penelitian Lai dan Sarkar (2011) yang juga menemukan upah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI di India, dengan menggunakan data dari 305 perusahaan di 14 industri di India pada periode 2002/2003 – 2005/2006 dan metode *Ordinary Least Square*. Demikian juga penelitian Alam dan Shah (2013) yang menemukan bahwa biaya tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan menggunakan data panel pada periode 1985-2009 dan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Namun, hubungan upah tidak selamanya berbanding terbalik dengan investasi.

Penelitian Schneider and Frey (1985) dan Vijayakumar, Sridharan dan Rao (2010) dalam Dua & Garg (2015) menemukan bahwa upah/gaji berpengaruh positif terhadap investasi (dalam hal ini FDI). Hubungan positif ini dimungkinkan terjadi apabila kenaikan upah atau pemberian upah yang tinggi kepada pekerja yang berkompoten atau memiliki keterampilan akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mendorong peningkatan investasi. Menurut Mentari & Yasa (2016) dalam Utma dan Rakhman (2019), hubungan positif dan signifikan dapat terlihat pada studi kasus Henry Ford dimana perusahaan Ford Motor Company memberikan upah minimum kepada para tenaga kerja di atas rata-rata dengan bukti yang menunjukkan bahwa membayar upah yang tinggi akan menguntungkan perusahaan, para pekerja yang bekerja di tempat tersebut merasa terpacu untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga laba perusahaan meningkat. Dengan diiringi peningkatan laba perusahaan, maka investasi perusahaan tersebut juga meningkat. Khasanah (2009) dalam Sitorus (2017) menyebutkan bahwa investor berani membayar upah yang tinggi pada beberapa kasus. Pekerja yang diberikan upah tinggi tersebut diasumsikan sebagai pekerja yang memiliki kualitas yang baik dan berketerampilan. Selama upah masih berada di titik keseimbangan produksi, maka kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas para pekerja dan meningkatkan keuntungan investor.

Penelitian Barrell dan Pain (1996) dan Biswas (2002) dalam Dua & Garg (2015) menemukan tidak ada dampak signifikan biaya tenaga kerja terhadap investasi. Temuan ini dapat dimungkinkan apabila determinan lain yang paling utama

memengaruhi investasi atau dengan kata lain biaya tenaga kerja atau upah bukan determinan bagi pemilik modal. Carstensen & Toubal (2003) dalam Lai dan Sarkar (2011) menyebutkan bahwa biaya tenaga kerja tidak memengaruhi aliran investasi (dalam hal ini FDI), apabila negara tujuan FDI memiliki potensi pasar yang tinggi serta lingkungan hukum dan ekonomi yang mendukung. Penelitian Gao (2005) di China dalam Lai dan Sarkar (2011) menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan dengan biaya tenaga kerja dalam menarik investasi asing dari negara maju.

Untuk Indonesia, penelitian Sodik dan Nuryadin (2008) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi di pada periode 1993-2003, dengan menggunakan metode *fixed effect model*. Untuk variabel investasi, penelitian ini menggunakan nilai total absolut dari PMA/FDI dan PMDN/DDI. Hasil yang relatif sama juga ditemukan pada penelitian Anggrainy (2013), dimana Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi di Kota Malang periode 2001-2011, dengan metode *two stage least square*. Hubungan negatif upah terhadap investasi atau PMA/FDI di Indonesia juga ditemukan pada penelitian Utma dan Rakhman (2019), namun tidak signifikan secara statistik pada periode 2013-2016.

Berbeda dengan hasil penelitian Sodik dan Nuryadin (2008), Utma dan Rakhman (2019), dan Anggrainy (2013), penelitian Sitorus (2017) menemukan hubungan yang searah dimana upah berpengaruh positif terhadap FDI di Pulau Jawa pada 2001-2016, dengan metode *fixed effect model*. Peneliti berargumentasi bahwa hubungan positif tersebut dapat terjadi apabila upah yang tinggi pada pekerja yang kompeten dan berketerampilan akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya meningkatkan investasi. Argumentasi tersebut didasarkan pada teori *efficiency wage* yang menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, hal tersebut juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Demikian sebaliknya. Teori *efficiency wage* yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif (Sitorus, 2017). Hubungan positif antara upah dengan investasi juga ditemukan dalam penelitian Sanusi et.al (2019). Penelitian ini menemukan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Pulau Jawa pada periode 2010-2018, dengan metode *random effect model*. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Sitorus (2017), hubungan positif ini dikaitkan dengan upah tinggi akan meningkatkan produktivitas pekerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan bagi investor. Biaya upah yang tinggi tanpa diikuti dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dapat menjadi masalah bagi perusahaan, karena dapat memengaruhi keuntungan yang didapatkan (Sanusi et.al, 2019).

2.3. Studi Empiris Tentang Pengaruh Tentang Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Investasi

Selain upah pekerja, faktor atau determinan lain yang memengaruhi kinerja investasi suatu negara adalah modal manusia atau *human capital* yang dimiliki oleh suatu negara. Penelitian Lall (1997), Dunning (2002), Donges (2005), serta Dunning dan Lundon (2008) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan bahwa iklim investasi yang menarik dan lingkungan kebijakan yang mendukung merupakan faktor penting agar negara berkembang berhasil menarik investasi (dalam hal ini FDI). Iklim investasi tersebut salah satunya terkait ketersediaan/kualitas faktor produksi, selain ukuran/akses pasar, biaya logistik, dan berbagai kondisi sosial politik yang kondusif untuk melakukan bisnis dengan risiko minimal (Karimi, et.al; 2013). Dalam literatur ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi adalah modal atau sumber daya manusia. Dengan demikian, modal manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan iklim investasi yang akhirnya mendorong kinerja investasi suatu negara. Pengalaman masa lalu dari berbagai negara yang berhasil menarik investasi menyatakan bahwa tingkat modal manusia atau *human capital* telah menjadi faktor krusial bagi perusahaan multinasional (terutama perusahaan bernilai tambah tinggi) untuk menentukan lokasi produksi baru (Karimi et.al, 2013). Lucas (1990) dalam Karimi, et. al (2013) menduga bahwa kurangnya modal manusia menyebabkan kurangnya FDI ke negara kurang berkembang.

Sejak 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah memperkenalkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indeks komposit dari pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Menurut BPS, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dengan demikian, indeks ini mencerminkan kualitas modal manusia yang diukur dari indikator tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat (Ezkirianto dan Alexandi, 2013). Artinya, kualitas modal manusia sebagai salah satu faktor produksi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, investasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Zhang dan Markusen (1999) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan ketersediaan tenaga terampil di negara tujuan investasi merupakan persyaratan utama perusahaan multinasional dan memengaruhi volume aliran masuk FDI. Dunning (1988) dalam Karimi, et. al (2013) menyatakan bahwa keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja dapat memengaruhi aliran masuk investasi (FDI) dan aktivitas produksi perusahaan multinasional di suatu negara. Penelitian Karimi et.al (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang diukur dari angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan di 50 negara yang masuk kategori *developed and developing countries*. Demikian juga penelitian Alsan et.al (2006) yang menemukan bahwa

tingkat pendidikan di 74 negara industrial dan berkembang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI pada periode 1980–2000.

Kesehatan yang dipandang sebagai salah satu pembentuk modal manusia dapat memengaruhi FDI melalui beberapa mekanisme. Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia/WHO (2001) dalam Alsan et.al (2006) menyatakan bahwa tenaga kerja yang sehat penting untuk menarik investasi langsung asing karena pengaruh kesehatan pada produktivitas pekerja. Kesehatan dapat memengaruhi kinerja ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kesehatan memengaruhi produktivitas pekerja. Pekerja yang sehat umumnya memiliki fisik dan mental yang kuat dibanding yang menderita penyakit. Kemudian, pekerja yang sehat kecil kemungkinan untuk absen bekerja atau memiliki produktivitas yang rendah dalam bekerja (Alsan et. al, 2006). Produktivitas tenaga kerja inilah yang menjadi salah satu determinan keputusan pelaku usaha untuk melakukan investasi.

Di sisi lain, Alsan et. al (2006) juga menyatakan keuntungan perusahaan akan berkurang atau menderita apabila biaya kesehatan bagi perusahaan tinggi. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terbatas mungkin harus membangun atau memberikan subsidi sistem jaminan kesehatan kepada karyawannya. Cuti sakit, biaya pemakaman, dan moral tenaga kerja yang rendah merupakan beban tambahan bagi investasi perusahaan. investor akan menghindari daerah yang penyakitnya merajalela dan akses layanan kesehatan terbatas sebagai tujuan investasi karena pertimbangan risiko kesehatan. Penelitian Alsan et.al (2006), dan Talukdar dan Parvez (2017) menemukan bahwa kesehatan yang diproksi dengan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi atau FDI.

Determinan modal manusia terakhir yang menjadi ukuran penghitungan IPM atau pembentuk modal manusia adalah daya beli masyarakat. Salah satu cerminan kemampuan daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Kenaikan tingkat pendapatan per kapita akan memengaruhi investasi dari beberapa mekanisme. Kenaikan tingkat pendapatan per kapita akan berimplikasi pada kenaikan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas modal manusia di suatu negara. Peningkatan kualitas modal manusia tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan mendorong keinginan investor untuk berinvestasi.

Mekanisme selanjutnya adalah melalui perubahan keseimbangan pasar secara agregat, baik pasar uang maupun pasar barang. Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan permintaan masyarakat secara agregat. Kenaikan permintaan secara agregat ini akan mendorong pelaku usaha atau produsen untuk memenuhi kenaikan permintaan tersebut dengan meningkatkan

kapasitas produksinya dengan menambah *capital stock* atau investasi. Artinya, kenaikan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap investasi. Penelitian Karimi et.al (2013), Alam dan Shah (2013), Alsan et.al (2006), dan Paudel (2016) menemukan hubungan positif antara PDB per kapita dengan investasi (FDI).

Namun, kenaikan pendapatan per kapita juga dimungkinkan berpengaruh negatif terhadap investasi. Kenaikan pendapatan per kapita akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat yang akhirnya meningkatkan permintaan uang. Kenaikan permintaan uang ini akan berdampak pada kenaikan suku bunga, pada kondisi *ceteris paribus*. Kenaikan suku bunga tersebut akhirnya akan meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung oleh investor atau pelaku usaha, yang pada gilirannya akan mengurangi investasi. Penelitian Walsh dan Yu (2010), Ali et.al (2013), dan Sitorus (2017) menunjukkan bahwa kenaikan PDB per kapita mengurangi investasi (FDI).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel dari 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011-2019. Data-data tersebut bersumber dari BPS. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *fixed effect model (FEM)*.

3.2. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh upah minimum terhadap investasi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode estimasi *FEM*. Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan referensi penelitian Sodik dan Nuryadin (2008). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Sodik dan Nuryadin adalah sama-sama menggunakan upah minimum provinsi sebagai salah satu variabel bebas yang memengaruhi investasi di Indonesia dan menggunakan metode *FEM* sebagai metode estimasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada data (jumlah provinsi dan periode) yang berbeda. Penelitian Sodik dan Nuryadin menggunakan data dari 26 (dua puluh enam) provinsi pada periode 1993-2003. Penelitian ini menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011-2019. Dalam penelitian ini, provinsi DKI Jakarta dan provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan dalam proses estimasi. Hal ini didasarkan pada sifat data provinsi DKI Jakarta merupakan *outlier*, yang diduga disebabkan oleh kedudukan provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah pusat pemerintahan nasional dan bisnis di Indonesia. Untuk Kalimantan Utara, tidak terdapat data yang lengkap sepanjang periode 2011-2019 yang diakibatkan oleh provinsi ini baru terbentuk pada 2013.

Perbedaan kedua dengan penelitian Sodik dan Nuryadin adalah data yang digunakan untuk variabel terikat yakni variabel investasi. Penelitian Sodik dan

Nuryadin menggunakan total PMA dan PMDN sebagai proksi investasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai data proksi investasi. Perbedaan ini didasarkan pada pandangan penulis bahwa penggunaan PMA/FDI ditambah PMDN/DDI sebagai proksi investasi agregat dari suatu perekonomian negara juga dirasa belum tepat. Hal ini didasarkan pada pernyataan BPS (2018) bahwa investasi dalam bentuk barang modal dikenal dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kemudian, PMA/FDI dan PMDN/DDI hanya merupakan sebagian dari total investasi yang dicatatkan sebagai PMTB dalam perhitungan PDB nasional.

Perbedaan selanjutnya adalah fokus penelitian yang berbeda. Penelitian Sodik dan Nuryadin lebih fokus untuk melakukan kajian terhadap berbagai determinan investasi di daerah. Adapun determinan yang diuji dalam penelitian tersebut adalah indikator *market size*, infrastruktur, spasial, ketenagakerjaan (yang salah satunya diproksi dengan upah minimum provinsi), dan ekonomi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia. Adapun variabel di luar UMP, seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, merupakan variabel kontrol lainnya dari model yang dibangun dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka spesifikasi model penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

$$INV_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 PEN_{it} + \beta_3 KES_{it} + \beta_4 DB_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- | | | |
|------|---|---|
| INV | : | Investasi yang merupakan nilai PMTB harga konstan (triliun rupiah). |
| UMP | : | Upah Minimum Provinsi (juta rupiah) |
| PEND | : | Tingkat Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (tahun). |
| KES | : | Tingkat Kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup (tahun). |
| DB | : | Daya Beli Masyarakat yang diukur dengan PDRB per Kapita Harga Konstan (juta rupiah) |

Berdasarkan persamaan (1), Investasi (INV) dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pendidikan (PEN), Tingkat Kesehatan (KES), dan Daya Beli Masyarakat (DB).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test*

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh upah minimum provinsi terhadap investasi, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood*

Ratio Test dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

4.2. Pembahasan

Dalam proses pengujian empiris, model pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* yang hasilnya disajikan dalam berikut ini:

$$\text{INV} = -286,63 - 3,25^*\text{UMP} + 8,64^*\text{PEN} + 3,59^*\text{KES} + 1,35^*\text{DB}$$

(0,00) (0,00)* (0,00)* (0,00)* (0,00)*

$$N = 288 \quad R^2 = 0,9835 \quad F\text{-Stat} = 431,11 \quad F\text{-Prob} = 0.00$$

*Keterangan: * = signifikan pada level $\alpha = 1$ persen*

Pada Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa nilai *F-statistic* (probabilitas model 0,00) menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Ini berarti bahwa keempat variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap investasi. Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel UMP memiliki tanda negatif dan signifikan secara statistik. Artinya, UMP berpengaruh negatif terhadap investasi dan signifikan secara statistik atau kenaikan upah minimum provinsi akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Lai dan Sarkar (2011), Alam dan Shah (2013), Sodik dan Nuryadin (2008), dan Anggrainy (2013) yang menemukan hubungan negatif antara upah dengan investasi (yang diukur dengan FDI).

Temuan lain dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat terhadap investasi. Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel PEN memiliki tanda positif dan signifikan secara statistik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel PEN berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV. Artinya, semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka akan menambah nilai investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Karimi et.al (2013), dan Alsan et.al (2006).

Selanjutnya, koefisien variabel KES juga memiliki tanda positif dan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel KES berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV. Artinya, bertambahnya tingkat kesejahteraan atau usia harapan hidup masyarakat akan berdampak pada peningkatan investasi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Alsan et.al (2006), dan Talukdar dan Parvez (2017) yang menemukan bahwa kesehatan yang diproksi dengan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi atau FDI.

Untuk variabel DB, penelitian ini menemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel INV, yang ditandai dengan koefisien variabel DB memiliki tanda positif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan investasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Karimi

et.al (2013), Alam dan Shah (2013), Alsan et.al (2006), dan Paudel (2016) yang menemukan hubungan positif antara PDB per kapita dengan investasi (FDI).

5. Penutup

5.1. Simpulan

Terdapat 2 (dua) temuan dalam penelitian ini. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga upah minimum provinsi akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya.

Kedua, variabel kontrol lainnya yakni tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi.

5.2. Saran

Literatur ilmu ekonomi dan bukti empiris berbagai penelitian menyatakan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi akan menambah *capital stock* pada perekonomian sebuah negara. Penambahan ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara nasional, yang akhirnya akan mendorong peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Salah satu determinan yang diperhatikan oleh investor atau pelaku usaha pada saat pengambilan keputusan investasi adalah upah tenaga kerja yang memang merupakan salah satu komponen yang memengaruhi beban biaya produksi. Di satu sisi, kenaikan upah tenaga kerja akan menekan kinerja investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upah minimum provinsi akan mengurangi nilai investasi. Di sisi lain, tren upah minimum provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah (khususnya pemerintah daerah) harus tetap berhati-hati dalam menetapkan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka mengurangi dampak kenaikan upah tenaga kerja terhadap nilai investasi secara agregat, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini diperlukan agar penetapan upah minimum sejalan dengan tingkat produktivitas pekerja itu sendiri. Jika sejalan, maka sangat dimungkinkan investor atau pelaku usaha menjadikan faktor upah tenaga kerja bukan determinan utama atas keputusan investasi. Kemudian, pemerintah juga harus terus berupaya mendorong peningkatan modal manusia di setiap daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pentingnya hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli sebagai ukuran atau pembentuk modal manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi.

Selain rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan penelitian, rekomendasi lainnya adalah dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh upah minimum atau upah tenaga kerja terhadap investasi. Kebutuhan penelitian lebih lanjut tersebut disebabkan oleh masih terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah data yang digunakan pada variabel dependen maupun independen yang merupakan data agregat pada level provinsi. Penggunaan data agregat tersebut akan berdampak pada berkurangnya tingkat akurasi, kelengkapan cakupan dan variasi data dari setiap variabel yang diuji. Kondisi ini akan mengurangi akurasi hasil uji estimasi dan berpotensi bias pada saat penarikan kesimpulan secara nasional. Apalagi, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penetapan upah minimum pada tingkatan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alam, Abdullah, dan Shah, Syed Zulfiqar Ali. 2013. Determinants of foreign direct investment in OECD member countries. *Journal of Economic Studies*, Vol. 40, No.4, hal. 515-527.
- Ali, Hina., Chaudhary, Imran Sharif., Ali, Huma., Tasneem, Amna dan Ali, Hira. 2013. Human Capital as Determinant of Foreign Direct Investment (FDI) in Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 17(7), hal. 877–884.
- Alsan, Marcella., Bloom, David E., dan Canning, David. 2004. The Effect Of Population Health On Foreign Direct Investment. Nber Working Paper Series, Working Paper 10596. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Alsan, Marcella., Bloom, David E., dan Canning, David. 2006. The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries. *World Development* Vol.34, No. 4, hal. 613-630.
- Anggrainy, Kholifah. 2013. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja Dan Investasi: Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1, No 2, hal. 1-14.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha, 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2015-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2011-2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dua, Pami dan Garg, Reetika. 2015. Macroeconomic Determinants Of Foreign Direct Investment: Evidence From India. *The Journal of Developing Areas*, Winter 2015, Vol. 49, No. 1 (Winter 2015), hal. 133-155.
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14-29. <https://doi.org/10.29244/jekp.v2i1.19949>.
- Kambono, Herman. 2020. Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Volume 12 Nomor 1, Mei 2020, hal. 137-145.
- Karimi, Mohammad Sharif., Yusop, Zulkornain., Hook Law Siong., dan Chin, Lee. 2013. Effect of Human Capital on Foreign Direct Investment Inflows. *Journal of Economic Research* 18 (2013), hal. 1-23.
- Kurniati, Yati., Prasmuko, Andry., dan Yanfitri. 2007. Determinan FDI (Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung). Working Paper, WP/06/2007. Jakarta: Bank Indonesia.
- Lai, Yu-Cheng dan Sarkar, Santanu. 2011. Labour Cost & Foreign Direct Investment-Evidence from India. *The Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 46, No. 3, January 2011, hal. 396-411.
- Paudel, Ramesh. 2016. Role of Human Development and Governance in Foreign Direct Investment in the Post Reform Era: The Case of Tanzania. *International Journal of Research & Methodology in Social Science*, 2(2), hal. 5-18.
- Rahardja, Prathama., dan Manurung, Mandala. 2010. Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardja, Prathama., dan Manurung, Mandala. 2014. Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sanusi, Muhammad., Kuncoro, Haryo Firas Tunas., dan Herianingrum, Sri. 2019. Makroekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi*/Volume XXIV, No. 02 July 2019, hal. 288-303.
- Sitorus, Daud Oloan. 2017. Pengaruh PDRB Perkapita, Inflasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Vol 5, No 2, hal. 1-14.

- Sodik, Jamzani dan Nuryadin, Didi. 2008. Determinan Investasi di Daerah: Studi Kasus Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.13 No.1, April 2008, hal. 15-31.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2012, Vol. 3, No. 1, hal. 29-50.
- Talukdar, Zayeed Hasan dan Parvez, Al-Amin. 2017. Measuring The Impact Of Population Health And Education On Foreign Direct Investment: Panel Evidence From 46 Countries. *Asian Economic and Financial Review*, 2017, 7(12), hal. 1242-1255.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Utma, Siti Syafaatul dan Rakhman, Arif. 2019. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2013-2016. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hal. 101-109.
- Walsh, James P., dan Yu, Jiangyan. 2010. Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach. IMF Working Paper, WP/10/187. Washington DC: International Monetary Fund